

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA BARAT
MENURUT PENGELUARAN
2011-2015**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA BARAT
MENURUT PENGELUARAN
2011-2015**

<http://jabar.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI JAWA BARAT
2011- 2015**

ISSN : 0854.9303
Nomor Publikasi : 32550.1602
Katalog BPS : 9207.32

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : 72 + vii halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Gambar Kulit:
Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran, BPS RI

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI JAWA BARAT
2011- 2015**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Ir. Bachdi Ruswana, MM
Editor : Ir. Hj. Ade Rika Agus, M.T

Penulis : Ir. Ninik Anisah, M.Sc
Marisa Intan, SP, MT, MPP
Yuni Anggorowati, S.ST

Pengolah data : Ir. Ninik Anisah, M.Sc
Marisa Intan, SP, MT, MPP
Yuni Anggorowati, S.ST

<http://jbar.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat ini menyajikan PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini seperti publikasi tahun lalu menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan pada masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, 1 Juli 2016

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT
KEPALA,



Bachdi Ruswana

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Pendapatan Regional	2
1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	4
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	6
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	7
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	10
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	13
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17
2.5 Perubahan Inventori	23
2.6 Ekspor Impor	28
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011-2015	31
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Jawa Barat Menurut Pengeluaran	33
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	39
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	47
3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah	49
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	52
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	56
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	59
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa.....	62

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011-2015	66
4.1	PDRB (Nominal)	67
4.2	Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	69
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	70
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	72
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	73
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	74
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	75
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	76
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	78
	PENUTUP	80
	LAMPIRAN	83

BAB I

PENDAHULUAN

<http://jabar.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PENDAPATAN REGIONAL

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. **Menurut Pendekatan Produksi,**

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalan, 3. Industri Pengolahan, 4. Perdagangan

Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. **Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. **Menurut Pendekatan Pengeluaran**, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut

sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN REGIONAL

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan komunikasi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.

7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<http://jabar.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<http://jabar.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi, adalah:

- makanan dan minuman baik bahan maupun makanan jadi, termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;
- perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
- bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;

- barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- jasa-jasa, seperti kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.), pendidikan (biaya sekolah, kursus, dsj.), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, dan ongkos pembantu rumah tangga;
- barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen luar wilayah atau luar negeri termasuk dalam konsumsi rumah tangga dan diperlakukan sebagai impor. Sedangkan pembelian langsung oleh non-residen diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut (UN, 1993).

Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk

dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis

pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena

profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;

- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas

semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PK-P Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*)

menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
1. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
1. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.

- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

3. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor

di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di "*deflate*" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan

dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “reflate” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang

software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam

bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;

- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/ BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak

langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila

data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

i **Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii **Konsep dan definisi**

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii **Cakupan**

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor

antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<http://jabar.bps.go.id>

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN
BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2011 - 2015

<http://jabar.bps.go.id>

Perubahan yang terjadi di negara lain dapat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia bahkan Provinsi Jawa Barat. Adanya isu akan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang lebih populer dengan istilah Brexit (Britain Exit) diramalkan akan berdampak terhadap perekonomian negara-negara berkembang. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, memang dampak negatif dari Brexit akan sampai ke Indonesia. Khususnya pada pergerakan nilai tukar, Indeks Harga Saham Gabung (IHSG) dan surat utang negara (SUN). Namun semoga hanya sementara sampai pasar keuangan global dapat menemukan keseimbangan baru. Bagi Jawa Barat hubungan perdagangan dengan Inggris relatif kecil demikian halnya dengan investasi, sehingga dampak yang mungkin timbul merupakan dampak tidak langsung, yaitu lebih kepada dampak perubahan struktur perdagangan global.

Perekonomian Jawa Barat dari sisi pengeluaran menggambarkan tentang, bagaimana seluruh produk barang dan jasa yang tercipta di wilayah Jawa Barat digunakan oleh sektor domestik (Rumahtangga, LNPRT, Pemerintah dan Swasta) untuk memenuhi permintaan akhir, serta diperdagangkan ke luar wilayah. Sebagian besar produk barang dan jasa digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir Rumahtangga, LNPRT dan Pemerintah. Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Dan sebagian cukup besar dijual ke luar wilayah Jawa Barat sebagai ekspor, dikurangi dengan produk barang dan jasa dari luar wilayah yang digunakan untuk memenuhi permintaan domestik (impor). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN

Mengacu kepada Rencana Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat, pembahasan dalam periode 2011-2015 mencakup dua tahap rencana pembangunan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Periode 2008-2013 merupakan tahapan “penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat” sedangkan periode 2013-2018 merupakan tahapan “memantapkan pembangunan secara menyeluruh”. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	671.158,67	734.272,45	812.568,32	881.109,40	983.714,23
2. Konsumsi LNPR	6.396,18	3.859,56	8.518,79	9.189,59	8.908,65
3. Konsumsi Pemerintah	59.786,93	69.994,16	73.717,54	81.202,69	98.292,76
4. PMTB	252.467,43	294.079,17	301.400,00	357.075,09	396.363,31
5. Perubahan Inventori	41.947,08	73.016,38	58.549,69	77.750,13	76.616,19
6. Ekspor	386.122,92	431.031,27	440.292,66	528.968,39	618.551,82
7. Impor	396.250,60	480.007,31	436.057,69	548.961,36	657.297,80
Total PDRB	1.021.628,60	1.128.245,68	1.258.989,33	1.386.333,93	1.525.149,16

PDRB menurut pengeluaran merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap program pembangunan Pemerintah Daerah. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan bidang investasi. Investasi digambarkan oleh besaran PMTB dan Perubahan Inventori,

yaitu investasi yang berupa aset tetap. Daya saing produk domestik juga diperlihatkan oleh besarnya peranan nilai ekspor.

Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh Provinsi Jawa Barat. Pada sisi pengeluaran, menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumber daya yang tercipta dalam wilayah. Penggunaan akhir untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan ke luar wilayah. Nilai PDRB Jawa Barat Indonesia (adh Berlaku) selama periode tahun 2011 s.d 2015 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

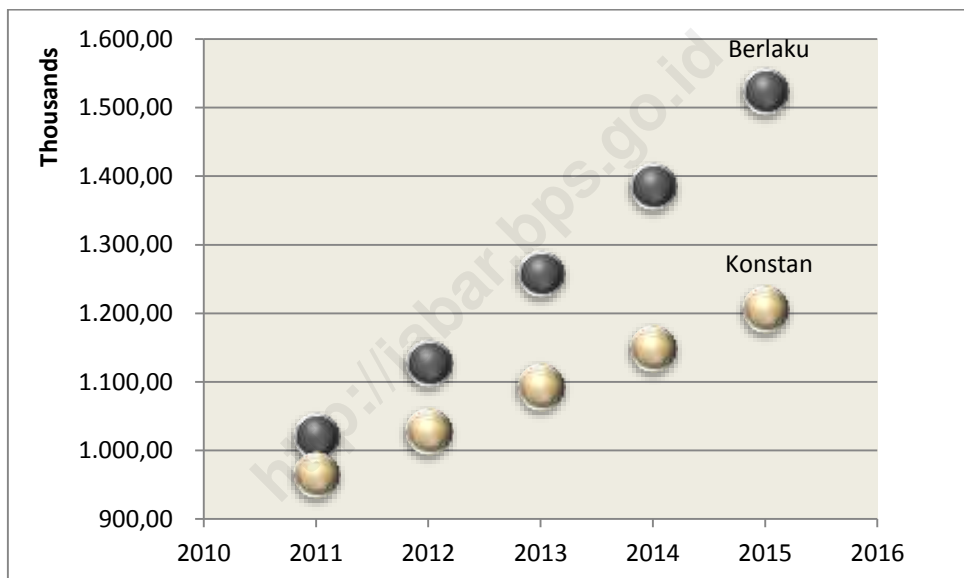
**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011-2015**

Komponen Pengeluaran	<i>(Miliar Rp)</i>				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	636.865,21	666.398,08	695.522,78	723.018,27	759.652,86
2. Konsumsi LNPRT	6.262,36	6.529,56	7.466,06	7.726,70	7.098,78
3. Konsumsi Pemerintah	54.949,79	58.348,05	58.868,33	61.314,91	65.952,76
4. PMTB	245.323,57	271.070,80	268.318,28	295.593,42	308.880,92
5. Perubahan Inventori	40.334,49	67.695,89	52.493,82	61.648,99	55.216,70
6. Ekspor	370.434,87	404.625,25	379.154,22	408.927,92	443.801,14
7. Impor	388.648,22	446.257,89	368.279,95	408.998,79	433.601,67
Total PDRB	965.622,06	1.028.409,74	1.093.543,55	1.149.231,43	1.207.001,49

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan

menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2011–2015, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jawa Barat berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 - 2015



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT),

konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011 – 2015**

Komponen Pengeluaran	<i>(Persen)</i>				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	65,69	65,08	64,54	63,56	64,50
1. Konsumsi LNPRT	0,63	0,61	0,68	0,66	0,58
2. Konsumsi Pemerintah	5,85	6,12	5,86	5,86	6,44
3. PMTB	24,71	26,07	23,94	25,76	25,99
4. Perubahan Inventori	4,11	6,47	4,65	5,61	5,02
5. Ekspor	37,79	38,20	34,97	38,16	40,56
6. Impor	38,79	42,54	34,64	39,60	43,10
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2011 - 2015, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 60 persen). Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, dan mencapai peranan tertinggi di tahun 2015 mencapai 40,56 persen, ini berarti produk Jawa Barat cukup banyak bersaing di pasar internasional maupun pasar Nasional. Demikian halnya impor masih mempunyai peran yang relatif besar, permintaan domestik masih belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh produk domestic sehingga peranan impor cukup besar mencapai 43,10 persen pada tahun 2015. Di sisi lain, pengeluaran untuk PMTB juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 23,94 s.d 26,07 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 5,85 - 6,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, perdagangan internasional dan antar provinsi yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa

pada tahun 2011-2012 nilai impor cenderung lebih tinggi dari nilai ekspor, sedangkan pada tahun 2013, posisi “surplus”, dan pada tahun 2014-2015 kembali nilai ekspor lebih rendah dari nilai impor yang menunjukkan dalam kondisi “defisit”.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2011 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2015

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,48	4,62	4,37	3,95	5,07
2. Konsumsi LNPRT	3,59	4,27	14,34	3,49	(8,13)
3. Konsumsi Pemerintah	0,05	6,18	0,89	4,16	7,56
4. PMTB	10,74	10,50	(1,02)	10,17	4,50
5. Perubahan Inventori	(8,96)	67,84	(22,46)	17,44	(10,43)
6. Ekspor	17,11	9,23	(6,29)	7,85	8,53
7. Impor	12,31	14,82	(17,47)	11,06	6,02
Total PDRB	6,50	6,50	6,33	5,09	5,03

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dari tahun 2011 s.d 2015 secara rata-rata mencapai 6,21 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,50 persen (2011); 6,50 persen (2012); 6,33 persen (2013); 5,09 persen (2014) dan 5,03 persen (2015). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 6,50 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2015 (5,03 persen). Kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat mengindikasikan melemahnya perekonomian Jawa Barat meskipun bukan merupakan penurunan pertumbuhan.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 - 2015**

Komponen Pengeluaran	<i>Persen</i>				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	105,37	110,19	116,83	121,87	129,50
2. Konsumsi LNPRT	102,14	105,05	114,10	118,93	125,50
3. Konsumsi Pemerintah	108,80	118,25	125,22	132,44	149,04
4. PMTB	102,91	108,49	112,33	120,80	128,32
5. Perubahan Inventori	104,00	107,86	111,54	126,12	138,76
5. Ekspor	104,24	106,53	116,12	129,35	139,38
6. Impor	101,96	107,56	118,40	134,22	151,59
Total PDRB	105,80	109,71	115,13	120,63	126,36

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Sedangkan perubahan indeks implisit secara total merupakan perubahan secara umum atau menurut berbagai kegiatan ekonomi.

Perubahan indeks implisit pada konsumsi rumahtangga tidak sama dengan besaran Indeks Harga Konsumen (IHK) yang disebabkan karena indeks implisit secara konseptual mencakup semua golongan rumahtangga baik kota maupun pedesaan dan pada semua komoditas, sedangkan IHK hanya mencakup sebagian komoditas rumahtangga perkotaan saja.

¹ *Indeks perkembangan*

3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Pembahasan mengenai konsumsi rumah tangga dalam ekonomi makro merupakan hal yang sangat penting. Alasan pertama adalah karena konsumsi rumah tangga telah memberikan pemasukan yang besar untuk pendapatan suatu negara/wilayah. Alasan yang kedua adalah pertimbangan bahwa besarnya pengeluaran untuk konsumsi berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diperoleh. Sehingga semakin besar pendapatan yang dimiliki, maka semakin besar pula jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh suatu rumah tangga. Hal inilah yang mempengaruhi besaran fluktuasi kegiatan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Permintaan akhir secara keseluruhan juga dapat memberikan dampak tarikan terhadap aktivitas ekonomi, tingginya permintaan terhadap barang dan jasa akan diikuti oleh peningkatan produksi. Data berikut menunjukkan di mana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2011 - 2015 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bertambahnya jumlah penduduk berpendapatan kelas menengah (middle class) menyebabkan terjadinya perbaikan serta merubah perilaku dan kebiasaan konsumsi penduduk secara agregat.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	671.158,67	734.272,45	812.568,32	881.109,40	983.714,23
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	636.965,21	666.398,08	695.522,78	723.018,27	759.652,86
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	65,69	65,08	64,54	63,56	64,50
Rata-rata konsumsi per- Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	57.252,77	61.669,39	67.218,71	71.821,90	79.233,66
b. ADHK 2010	54.335,92	55.968,82	57.536,27	58.935,41	61.186,55
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	15.274,85	16.447,47	17.921,35	19.142,23	21.060,22
b. ADHK 2010	14.496,65	14.927,10	15.339,89	15.707,68	16.263,31
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	4,48	4,62	4,37	3,95	5,07
b. Per-RT	2,83	3,01	2,80	2,43	3,82
c. Perkapita	2,79	2,97	2,77	2,40	3,54
Jumlah RT (<i>unit</i>)	11.722.729	11.906.596	12.088.424	12.267.977	12.415.357
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	43.938,80	44.643,50	45.340,80	46.029,60	46.709,60

Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2011 s.d 2015 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2011

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2011)

yaitu 65,69 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 64,50 persen.

Pada tahun 2011, secara umum setiap rumah tangga di Indonesia menghabiskan dana sekitar 57.252,77 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi anggota rumahtangganya baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 61.669,39 ribu rupiah (2012); 67.218,71 ribu rupiah (2013); 71.821,90 ribu rupiah (2014); dan menjadi 79.233,66 ribu rupiah (2015).

Sementara itu, pada perkiraan adh Konstan 2010, laju pertumbuhan rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 3 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,82 persen. Kenaikan konsumsi rumah tangga per rumah tangga menggambarkan adanya peningkatan jumlah anggota rumahtangga, atau peningkatan kualitas komoditi yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut. Secara umum, peningkatan rata-rata konsumsi per rumahtangga menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan pertumbuhan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Dengan demikian, konsumsi rata - rata perkapita selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya, pertumbuhan ini terjadi baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini memberi gambaran bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Jawa Barat meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara "riil" berkisar antara 2,79 s.d 3,54 persen, dan peningkatan rata-rata untuk konsumsi secara nilai berkisar antara 367,79 - 55,63 ribu rupiah. Pergerakan nilai rata-rata konsumsi perkapita ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan tahun 2010 sebesar 4,48 persen tahun 2011, kemudian, meningkat pada tahun berikutnya yaitu 4,62 persen. Pada tahun 2013 melambat menjadi 4,37 persen dan pada 2014 kembali melambat menjadi 3,95 persen. Selanjutnya pada tahun 2015 konsumsi rumah tangga meningkat yaitu sebesar 5,07 persen. Sementara itu, konsumsi per-kapita meningkat sebesar 2,79 persen di tahun 2011 dan 2,97 persen di tahun 2012. Namun pada tahun berikutnya (2013 dan 2014) melambat menjadi 2,77 persen dan 2,40 persen. Pada tahun 2015 meningkat signifikan dan yang tertinggi sepanjang periode yaitu 3,54 persen. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data agregat PDRB ini.

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 – 2015³

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	35,49	36,67	37,64	38,96	39,40
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,26	4,35	4,31	4,11	4,19
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,54	12,12	12,24	11,86	12,11
d. Kesehatan & Pendidikan	6,26	6,05	6,02	5,95	5,78
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	28,57	27,86	27,35	26,82	26,80
f. Hotel & Restoran	7,05	6,95	6,68	6,49	6,02
g. Lainnya	5,83	5,99	5,76	5,81	5,71
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Tabel 7 menggambarkan struktur penggunaan konsumsi akhir rumah tangga, terlihat bahwa secara rata-rata dari tahun 2011 s.d 2013, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Jawa Barat, didominasi oleh konsumsi bukan makanan dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 35,49 persen (2011) ; 36,67 persen (2012) ; 37,64 persen (2013) ; 38,96 persen (2014) ; dan 39,40 persen (2015). Adapun porsi non makanan memiliki kecenderungan yang menurun selama periode 2011 - 2015, pada tahun 2011 sebesar 64,51 persen dan terus mengalami penurunan peranan menjadi 60,60 persen pada tahun 2015. Hal tersebut menggambarkan bahwa pola konsumsi masyarakat Jawa Barat memiliki kecenderungan kembali kepada prioritas pemenuhan kebutuhan primer. Dalam kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, hal tersebut menyebabkan rumah tangga melakukan beberapa pilihan dalam melakukan konsumsi. Seiring dengan perlambatan tingkat pendapatan maka pola konsumsi cenderung kembali kepada pemenuhan kebutuhan primer.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya. Dalam konsep System of National Account 2008 (SNA 2008) komoditi makanan jadi produk penyedia makanan dan minuman (restoran) termasuk dalam konsumsi non makanan.

Pola konsumsi masyarakat menggambarkan susunan akan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dan tergantung terutama berdasarkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu pada suatu wilayah. Setiap wilayah memiliki pola konsumsi yang khas. Provinsi Jawa Barat memiliki pola konsumsi masyarakat yang cenderung ke arah perkotaan, hal tersebut disebabkan oleh dominasi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Berdasarkan data proyeksi penduduk, pada tahun 2015 persentase penduduk Jawa Barat yang tinggal di perkotaan mencapai 72,9 persen, dan sisanya 27,1 persen tinggal di daerah pedesaan.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 – 2015

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,11	4,33	4,32	5,48	6,83
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,63	9,54	7,95	2,64	7,59
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga					
d. Kesehatan & Pendidikan	1,86	3,27	3,77	1,84	5,66
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,24	2,92	7,23	4,97	3,00
f. Hotel & Restoran	4,99	4,53	4,10	3,28	4,14
g. Lainnya	4,94	6,07	3,37	(0,26)	2,17
	10,72	6,08	2,71	8,01	1,83

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 4,11 persen (2011) ; 4,33 persen (2012) ; 4,32 persen (2013) ; 5,48 persen (2014) dan 1,96 persen (2015). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran

masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 – 2015⁴

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,58	8,34	8,87	6,41	5,68
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,20	1,99	1,66	0,74	5,75
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,46	2,40	7,69	3,12	7,94
d. Kesehatan & Pendidikan	2,34	2,86	2,71	2,11	5,17
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,89	2,08	4,34	2,97	7,11
f. Hotel & Restoran	1,62	1,67	2,87	5,59	1,45
g. Lainnya	3,40	5,96	3,59	1,34	7,65

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga (inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2011, namun pada tahun-tahun berikutnya peningkatan harga relatif stabil. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 8,58 persen (2011); 8,34 persen (2012); 8,87 persen (2013); 6,41 persen (2014) dan 5,68 persen (2015). Sementara itu, konsumsi pakaian dan alas kaki dari menjadi 2,20 persen (2011). Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 1,99 persen (2012); 1,66 persen (2013); 0,74 persen (2014) dan 5,75 persen (2015). Pada periode tahun 2011 s.d 2015, harga kelompok makanan meningkat lebih tinggi dari kelompok konsumsi lainnya.

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	6.396,18	6.859,56	8.518,79	9.189,59	8.908,65
b. ADHK 2011 (Miliar Rp)	6.262,36	6.529,56	7.466,06	7.726,70	7.098,78
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,63	0,61	0,68	0,66	0,58

Nilai konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumahtangga (LNPRT) selalu meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Institusi ini merupakan lembaga non pemerintah yang dibiayai secara mandiri oleh masyarakat. Dalam pembahasan global dikenal dengan istilah civil society. Peranan konsumsi LNPRT kurang signifikan, pada tahun 2011 sebesar 0,63 persen, menurun selama dua tahun berturut-turut menjadi 0,61 persen pada tahun 2012 dan 0,68 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 menurun menjadi 0,66 persen dan kembali menurun di tahun 2015 menjadi 0,58 persen.

Pada tahun 2015, di Provinsi Jawa Barat diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 8 kabupaten/kota. Pada momen ini, peran partai politik sebagai saluran aspirasi rakyat, sosialisasi politik, rekrutmen

politik, komunikasi politik, dan institusi pendidikan politik sangat penting. Terkait dengan dana yang dikelola pada saat penyelenggaraan Pilkada cukup besar, sebagai salah satu Lembaga Non Profit yang melayani rumahtangga, partai politik mengelola dana yang dikumpulkan dari anggota (masyarakat) atau konstituennya, dan juga sebagian dana publik dari pemerintah. Porsi dana publik dari pemerintah tidak terlalu besar, karena akan menjadikan partai politik dikuasai pemerintah dan akhirnya akan mengasingkan mereka dari kepentingan dan nilai-nilai masyarakat di mana mereka berakar.

Peran penting partai politik dalam Pilkada langsung adalah untuk menghadirkan kandidat-kandidat yang berkualitas meskipun dimungkinkan melalui jalur independen, namun sebagian besar kandidat diusung oleh partai politik atau koalisi. Dalam menjalankan peran tersebut diperlukan dana yang cukup besar dalam pergulatan politik lokal, karena sistem kepartaian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari eksistensi kepeguruan di pusat. Proses tersebut melibatkan pengelolaan dana yang sangat besar, meliputi biaya koordinasi, kampanye, sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media serta kegiatan - kegiatan baik politik maupun sosial. Oleh karena itu pada masa persiapan pemilihan umum yang diawali pada tahun 2013 dan pada saat Pemilihan Legislatif di tahun 2014 yang dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden peranan LNPRM meningkat signifikan. Selanjutnya pada tahun 2015 rangkaian pesta demokrasi masih berlanjut dengan Pilkada serentak di 8 kabupaten kota di Jawa Barat, namun secara skala penyelenggaraannya lebih kecil sehingga peranannya sedikit menurun.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian provinsi Jawa Barat serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	59.786,93	68.994,16	73.717,54	81.202,69	98.292,76
b. ADHK 2011 (<i>Miliar Rp</i>)	54.949,79	58.348,05	58.868,33	61.314,91	65.952,76
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	5,85	6,12	5,86	5,86	6,44
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	1.360,69	1.545,45	1.625,85	1.764,14	2.104,34
b. ADHK 2011	1.250,60	1.306,98	1.298,35	1.332,08	1.411,97
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	0,05	6,18	0,89	4,16	7,56
b. Konsumsi perkapita	(1,57)	4,51	(0,66)	2,60	6,00
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	43.938,80	44.643,50	45.340,80	46.029,60	46.709,60

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2011 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 59.786,93 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2015 nilainya mencapai 98.292,76 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, dari 5,85 persen di tahun 2011 menjadi 6,44 persen pada tahun 2015. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2011; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2011 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 1.360,69 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang minus 1,57 persen pada tahun 2011, pada 2012 pertumbuhannya meningkat sebesar 4,51 persen. Pada tahun 2013 menurun sebesar minus 0,73 persen, meningkat 3,60 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 meningkat 6 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per

penduduk). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan 2015, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 6,18 persen dan 7 persen; untuk konsumsi per-kapita 4,51 persen dan 6 persen.

Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja Pemerintah ⁶)					
a. Konsumsi Kolektif (<i>Miliar Rp</i>)	33.026,76	37.638,70	41.628,11	46.353,99	55.235,87
(%)	55,24	54,55	56,47	57,08	56,20
b. Konsumsi Individu (<i>Miliar Rp</i>)	26.760,17	31.355,45	32.089,44	34.848,70	43.056,89
(%)	44,76	45,45	43,53	42,92	43,80
Total Konsumsi (<i>Miliar Rp</i>)	59.786,93	68.994,16	73.717,54	81.202,69	98.292,76
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan riil (ADHK2011) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	(0,28)	6,30	4,43	3,79	6,31
b. Konsumsi Individu	0,45	6,05	(3,39)	4,64	9,19
Total Konsumsi	0,05	6,18	0,89	4,16	7,56
Pertumbuhan indeks harga (%) implisit ⁷					
a. Konsumsi Kolektif	9,93	7,21	5,90	7,29	12,09
b. Konsumsi Individu	7,44	10,49	5,93	3,78	13,15
Total Konsumsi	8,80	8,68	5,90	5,76	12,53

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Sekitar 55 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 10). Namun proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah mengalami fluktuasi. Tahun 2011 sebesar 55,24 persen, tahun berikutnya menurun menjadi 54,55

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁷ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

persen (2012) meningkat kembali di tahun 2013 menjadi 56,47 persen, pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 57,08 persen dan pada tahun 2015 kembali menurun pada tahun 2015 yaitu 56,20 persen.

Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 12). Secara umum, proporsi konsumsi individu pada periode 2011-2015 juga cenderung menurun. Hanya pada tahun 2012 saja proporsinya meningkat menjadi 45,45 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi dalam suatu perekonomian dibedakan menjadi investasi finansial dan investasi fisik. Investasi finansial merupakan pemindahan kepemilikan asset finansial diantara institusi pelaku ekonomi. Investasi fisik merupakan aktivitas pembentukan asset untuk menambah kapasitas produksi atau Pembentukan Modal Bruto. Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto. Pembentukan Modal Tetap Bruto adalah merupakan penambahan dan pengurangan asset tetap pada suatu unit produksi dengan kata lain porsi perekonomian di suatu wilayah yang dialokasikan untuk pembelian barang modal berupa gedung, mesin, peralatan dan perlengkapan.

Apabila ditinjau dampaknya terhadap perekonomian secara luas maka aktivitas investasi fisik memiliki *multiplier effect* lebih besar terhadap sektor ekonomi produktif dibandingkan dengan aktivitas investasi finansial. Investasi finansial relative lebih cepat mengalami perpindahan kepemilikan dan terpengaruh kondisi sosial ekonomi dan politik global, sehingga dengan mobilisasi yang cukup tinggi investasi ini dianggap rentan penarikan modal ke luar wilayah. Penarikan sejumlah modal ke luar wilayah apalagi secara massive akan berpengaruh terhadap ketidakstabilan ekonomi suatu wilayah.

Pada periode lima tahun terakhir (2011-2015) nilai PMTB adh Berlaku setiap tahun berturut-turut mengalami kenaikan, tercatat pada tahun 2011 nilai PMTB masih sebesar 252.467 miliar rupiah kemudian pada tahun 2015 telah mencapai 396.363 miliar rupiah atau selama periode tersebut mengalami penambahan nilai sebesar 143.896 miliar rupiah. Peningkatan tersebut sejalan dengan nilai PMTB adh Konstan 2010 yang mengalami peningkatan nilai berturut-turut setiap tahun, tercatat pada tahun 2015 mencapai 308.881 miliar rupiah. Peningkatan nilai PMTB adh Konstan 2010 menggambarkan pertumbuhan riil komponen PMTB di Jawa Barat selama lima tahun terakhir karena nilainya tidak dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan harga komponen PMTB.

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	252.467,43	294.079,17	301.400,00	357.075,09	396.363,31
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	245.323,57	271.070,80	268.318,28	295.593,42	308.880,92
Proporsi terhadap PDRB (% -	24,71	26,07	23,94	25,76	25,99
<u>Struktur PMTB [1]</u>					
a. Bangunan (MiliarRp)	172.293,01	201.886,56	233.363,31	261.507,96	288.694,44
(%)	68,24	68,65	77,43	73,24	72,84
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	80.174,42	92.192,61	68.036,69	95.567,13	107.686,25
(%)	31,76	31,35	22,57	26,76	27,17
Total PMTB (Miliar Rp)	252.467,43	294.079,17	301.400,00	357.075,09	396.363,31
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Pertumbuhan[2] (%)</u>					
a. Bangunan	9,81	12,07	10,81	4,00	4,68
b. Non Bangunan	12,77	7,17	-27,14	30,90	3,99
Total PMTB	10,74	10,50	-1,02	10,17	4,50

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ ADHK 2010)

Pertumbuhan komponen PMTB pada tahun 2011-2012 mencapai angka di atas 10 persen hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia yang berdampak terhadap perekonomian nasional dan regional. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung perekonomian

berdampak pada peningkatan laju PMTB Bangunan pada periode tersebut hingga di atas 9 (sembilan) persen. Seiring dengan membaiknya perekonomian dunia maka hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja terhadap barang dan jasa. Jumlah peningkatan *demand* berdampak terhadap peningkatan kapasitas produksi khususnya di Jawa Barat. Peningkatan permintaan produksi memerlukan dukungan pada belanja sarana produksi. Hal ini merupakan salah satu penyebab peningkatan kinerja komponen PMTB Non Bangunan pada tahun 2011 hingga dua digit yaitu sebesar 12,77 persen dan pada tahun berikutnya pertumbuhan melambat menjadi sebesar 7,17 persen.

Komponen PMTB pada tahun 2013 secara riil mengalami penurunan pertumbuhan meski demikian nilainya mengalami peningkatan yaitu dari posisi 294.074 miliar menjadi 301.400 miliar. Penurunan kinerja PMTB ini dipengaruhi oleh krisis ekonomi global dan nasional. Krisis ekonomi global berpengaruh terhadap penurunan jumlah PMA di Jawa Barat, sementara di tingkat nasional akibat pengaruh tingginya impor sehingga mengakibatkan defisit APBN. Penurunan kondisi perekonomian nasional berpengaruh terhadap kepercayaan pasar juga mengalami penurunan sehingga pelaku pasar memilih menunda untuk menanamkan modal di Jawa Barat sehingga berpengaruh terhadap penurunan PMDN. Lebih lanjut, sektor pemerintahan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang melakukan aktivitas pembentukan modal tetap bruto, selain rumah tangga, LNPRT dan swasta. Selain itu penurunan kinerja PMTB berkaitan dengan rendahnya serapan anggaran belanja negara terutama untuk komponen belanja modal.

Seiring dengan membaiknya perekonomian maka kinerja komponen PMTB mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,17 persen, meskipun demikian pada tahun 2015 terjadi perlambatan pertumbuhan

sebesar 4,50 persen. Peningkatan kinerja PMTB seiring dengan meningkatnya kinerja PMA/PMDN pada tahun 2014 dan 2015 mencapai lebih dari 10 persen. Pendukung peningkatan kinerja PMTB lainnya adalah peningkatan laju nilai komponen impor barang modal pada tahun 2015 yaitu sebesar 13,68 persen.

Komponen PMTB ini dipengaruhi oleh pertumbuhan sub komponen PMTB yaitu bangunan dan non bangunan. Selama periode 2011-2015 sub komponen bangunan mengalami pertumbuhan positif dimana mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 12,07 persen kemudian pertumbuhan melambat pada tahun 2014-2015 dengan pertumbuhan pada level 4 (empat) persen. Pada sub komponen non bangunan seperti mesin, mengalami pertumbuhan berfluktuasi sepanjang periode 2011-2015. Tercatat komponen PMTB Non Bangunan mengalami kontraksi signifikan pada tahun 2013 sebesar 27,14 persen.

Secara proporsi dalam komponen PMTB maka sub komponen bangunan memiliki peranan lebih besar dibandingkan dengan sub komponen non bangunan. Tercatat kontribusi sub komponen bangunan selama periode 2011-2012 berada pada posisi di atas 68 persen, kemudian berangsur meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 77,43 persen sekaligus merupakan kontribusi terbesar selama lima tahun terakhir (2011-2015). Pada periode selanjutnya 2014-2015 secara berturut-turut kontribusi sub komponen bangunan mengalami penurunan kontribusi hingga pada posisi di bawah 74 persen seperti terlihat pada Tabel 13.

Sementara itu selama 5 (lima) tahun terakhir sub komponen non bangunan memiliki tendensi kontribusi yang fluktuatif terhadap total PMTB. Tercatat selama periode 2011-2012 sub komponen non bangunan berada pada posisi di atas 31 persen. Penurunan kontribusi yang cukup besar terjadi pada tahun 2013 hingga pada posisi 22,57 persen, hal ini berkaitan dengan krisis

ekonomi sehingga berdampak terhadap penurunan nilai belanja modal yang dilakukan oleh institusi pelaku ekonomi. Kontribusi sub komponen PMTB non bangunan pada periode 2014-2015 secara berturut-turut kembali meningkat hingga akhir periode pada posisi 27,17 persen.

Kondisi PMTB di tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 10,17 persen menjadi 4,50 persen. Perlambatan ini didukung oleh perlambatan dari laju non bangunan dari 30,90 persen di tahun 2014 menjadi 3,90 persen di tahun 2015. Adapun laju komponen PMTB Bangunan justru mengalami peningkatan yaitu dari 4 (empat) persen di tahun 2014 menjadi 4,68 persen di tahun 2015. Perlambatan laju non bangunan yang sangat signifikan ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2015 sebesar 4,42 persen. Selain itu perlambatan kinerja komponen PMTB Non Bangunan dipengaruhi oleh penurunan jumlah kendaraan bermotor baru sebesar 14,84 persen pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yang berasal dari data SAMSAT Provinsi Jawa Barat.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Inventori merupakan bagian dari investasi fisik yang berperan dalam keberlangsungan proses produksi. Perubahan inventori menggambarkan porsi investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku maupun bahan penolong pada satu periode yang masih dikuasai oleh produsen. Pada kerangka PDRB dan Tabel Input Output komponen inventori merupakan bagian dari komponen konsumsi akhir. Proporsi komponen perubahan inventori dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Nilai Inventori					
a. ADHB	41.947,08	73.016,38	58.549,69	77.750,13	76.616,19
b. ADHK	40.334,49	67.695,89	52.493,82	61.648,99	55.216,70
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	4,11	6,47	4,65	5,61	5,02

Nilai komponen Perubahan inventori pada tahun 2011 sebesar 41.947 miliar rupiah dengan kontribusi terhadap perekonomian Jawa Barat sebesar 4,11 persen. Pada tahun 2012 perubahan inventori mengalami penambahan sebesar 31.069 miliar rupiah sehingga berada pada level 73.016,38 miliar rupiah, hal ini berdampak mengalami peningkatan kontribusi terhadap perekonomian Jawa Barat menjadi sebesar 6,47 persen. Perubahan inventori mengalami pengurangan signifikan pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 14.467 miliar rupiah sehingga nilai perubahan

inventori menjadi sebesar 58.550 miliar rupiah. Pengurangan nilai inventori secara langsung berdampak terhadap penurunan kontribusi komponen perubahan inventori terhadap perekonomian Jawa Barat menjadi sebesar 4,65 persen.

Pada tahun 2014 komponen perubahan inventori mengalami penambahan sebesar 14.467 miliar rupiah sehingga nilai perubahan inventori bertambah menjadi sebesar 77.750 miliar rupiah, hal ini memberi dampak secara langsung terhadap peningkatan kontribusi komponen ini terhadap perekonomian Jawa Barat menjadi sebesar 5,61 persen. Komponen perubahan inventori kembali mengalami penurunan tipis pada tahun 2015 sebesar 1.134 miliar rupiah sehingga nilai komponen ini menjadi 76.616 miliar rupiah sehingga kontribusi terhadap perekonomian menurun menjadi sebesar 5,02 persen.

Penurunan nilai komponen perubahan inventori pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan pada lapangan usaha industri pengolahan. Tercatat pada tahun 2015 perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 4,42 persen. Tercatat dari 16 sub kategori dalam lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 10 sub kategori mengalami penurunan atau perlambatan pertumbuhan.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Pada suatu perekonomian terbuka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam suatu wilayah diperlukan transaksi perdagangan dengan pelaku ekonomi non residen karena tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di dalam suatu wilayah. Aktivitas ekspor merupakan transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi atas barang dari residen suatu wilayah terhadap pelaku ekonomi non residen. Selain itu aktivitas ekspor

dapat meningkatkan nilai tambah produk barang dan jasa produksi suatu wilayah dan menambah devisa suatu wilayah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor luar negeri dapat dibedakan menjadi internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas proses produksi, distribusi, pemasaran, SDM, manajerial dan kualitas dimana kesemua faktor tersebut harus memenuhi standar tertentu. Hal ini akan berdampak terhadap biaya produksi dan harga produk akhir sehingga pada akhirnya akan menentukan daya saing produk barang dan jasa dalam tataran global. Sementara faktor eksternal meliputi : (1) kondisi perekonomian global terutama negara-negara raksasa ekonomi sebagai tujuan ekspor utama, (2) harga komoditas di tingkat internasional serta (3) aspek legal perdagangan internasional yang ditetapkan oleh World Trade Organization (WTO).

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 - 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	386.122,92	431.031,27	440.292,66	528.968,39	618.551,82
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	370.434,87	404.625,25	379.154,22	408.927,92	443.801,14
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	37,79	38,20	34,97	38,16	40,56
<u>Pertumbuhan</u>					
Total ekspor	17,11	9,23	-6,29	7,85	8,53

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Secara makro ekonomi ditinjau dari struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar

negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah Jawa Barat tidak seluruhnya dilakukan oleh residen, tetapi terdapat permintaan dari non residen. Permintaan barang dan jasa terhadap produk domestic dari non residen dimana diwujudkan dalam aktivitas perdagangan internasional berupa transaksi ekspor.

Nilai ekspor Jawa Barat selama lima tahun terakhir (2011-2015) secara berturut-turut mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan nilai ekspor merupakan indikasi positif bagi perekonomian Jawa Barat, yaitu menggambarkan peningkatan permintaan luar negeri terhadap barang dan jasa produksi Jawa Barat. Komponen ekspor berlaku sebagai faktor penambah bagi perekonomian sekaligus memberikan pengaruh terhadap penambahan devisa negara. Tercatat nilai ekspor adh Berlaku hingga tahun 2015 mencapai 618.552 miliar rupiah sementara nilai pada tahun 2011 masih mencapai 386.123 miliar rupiah sehingga selama lima tahun terakhir mengalami penambahan nilai sebesar 232.429 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor adh Konstan 2010 secara berturut-turut selama lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami kenaikan, tercatat pada tahun 2015 mencapai 443.801 miliar rupiah. Penambahan nilai ekspor adh Konstan menunjukkan peningkatan kinerja riil komponen ekspor dalam perekonomian Jawa Barat selama 5 (lima) tahun terakhir.

Kontribusi komponen ekspor terhadap perekonomian selama lima tahun terakhir (2011-2014) mencapai di atas 34 persen. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 40,56 persen, sementara kontribusi terendah komponen ini terjadi pada tahun 2013 sebesar 34,97 persen meskipun

mengalami penurunan kontribusi pada tahun 2013 tetapi nilai komponen ini mengalami peningkatan.

Apabila dicermati lebih lanjut komposisi ekspor Jawa Barat mayoritas merupakan ekspor barang dengan rata-rata selama lima tahun terakhir (2011-2015) sebesar 98,37 persen, sisanya merupakan ekspor jasa dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun terakhir sebesar 1,63 persen. Pelemahan harga komoditas non migas internasional berdampak secara langsung terhadap kinerja ekspor Jawa Barat dikarenakan mayoritas ekspor Jawa Barat merupakan ekspor barang non migas.

Selama periode 2011-2015 ekspor Jawa Barat tahunan memiliki kecenderungan pertumbuhan yang fluktuatif. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan peningkatan signifikan sebesar 17,11 persen, sementara laju pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2013 sebesar 6,29 persen. Penurunan kinerja ekspor Jawa Barat pada tahun 2013 ini sebagai dampak dari kondisi perekonomian dunia yang belum membaik, terutama negara-negara tujuan ekspor utama Jawa Barat seperti Amerika Serikat, Jepang dan China dengan pengurangan permintaan ekspor.

Pertumbuhan ekspor barang secara level tidak berbeda jauh dengan ekspor total karena sharenya yang besar sehingga pergerakannya pun searah dengan ekspor total. Sementara ekspor jasa selama 4 (empat) tahun terakhir (2011-2014) mengalami pertumbuhan positif, dengan kecenderungan perlambatan pertumbuhan dari tahun ke tahun setelah terjadi puncak pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar 20,19 persen hingga pada tahun 2014 pertumbuhan ekspor jasa melambat sebesar 1,30 persen dibandingkan dengan laju pada tahun 2013. Sementara itu pertumbuhan negatif ekspor jasa terjadi pada tahun 2015 sebesar 14,19 persen.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Gambaran aktivitas impor adalah merupakan transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi mencakup pembelian, barter, hadiah atau hibah atas barang dari pelaku ekonomi non residen terhadap residen suatu wilayah. Sementara itu dalam suatu perekonomian untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa residen suatu wilayah maka *supply* barang dan jasa tersebut dapat berasal dari produksi domestik dan aktivitas impor yang merupakan produksi non residen. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan suatu wilayah terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk suatu wilayah di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 - 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	396.250,60	480.007,31	436.057,69	548.961,36	657.297,80
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	388.648,22	446.257,89	368.279,95	408.998,79	433.601,67
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	38,79	42,54	34,64	39,60	43,10
<u>Pertumbuhan</u>					
Total impor	12,31	14,82	(17,47)	11,06	6,02

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Nilai komponen impor luar negeri adh Berlaku pada periode lima tahun terakhir (2011-2015) memiliki kecenderungan yang meningkat meski terjadi penurunan nilai pada tahun 2013. Pada tahun 2011 nilai impor adh Berlaku mencapai 396.251 miliar rupiah kemudian pada tahun 2015 telah mencapai 657.298 miliar rupiah atau selama periode lima tahun terakhir mengalami penambahan nilai sebesar 261.047 miliar rupiah. Sementara itu nilai komponen impor luar negeri adh Konstan 2010 selama periode 2011-2015 terjadi penambahan nilai pada tahun 2011-2012 kemudian mengalami pengurangan pada tahun 2013 tercatat 368.280 miliar atau mengalami pengurangan nilai sebesar 77.978 miliar. Sementara pada tahun 2014-2015 nilai komponen impor luar negeri berturut-turut mengalami peningkatan meski belum kembali pada level tahun 2012.

Pada tahun 2014-2015 nilai impor luar negeri mengalami peningkatan tidak signifikan. Pola ini menjadi indikasi harga komoditas impor mengalami peningkatan signifikan tiap periode, sementara di tahun 2013 aktivitas impor luar negeri Jawa Barat mengalami penurunan. Penurunan impor merupakan indikasi positif bagi perekonomian Jawa Barat dimana impor berlaku sebagai

pengurang terhadap perekonomian dan menunjukkan penurunan ketergantungan terhadap produk non residen.

Komponen impor luar negeri Jawa Barat dibedakan menurut klasifikasi *Broad Economic Categories* (BEC) dimana menunjukkan kategori akhir penggunaan barang. Tercatat klasifikasi impor luar negeri disertai dengan besaran proporsi pada tahun 2015 yaitu (1) impor bahan baku sebesar 78,70 persen (2) impor barang modal sebesar 14,37 persen dan (3) impor barang konsumsi sebesar 6,93 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas impor luar negeri Jawa Barat didominasi oleh impor bahan baku sehingga ketika *demand* terhadap ekspor barang meningkat maka akan memicu peningkatan aktivitas impornya untuk memenuhi bahan baku bahkan barang modal.

Kontribusi komponen impor dalam perekonomian Jawa Barat selama periode 2011-2015 menunjukkan tendensi yang semakin menurun. Pada tahun 2011 komponen impor memberikan kontribusi sebesar 38,79 persen terhadap perekonomian Jawa Barat meskipun demikian kontribusinya mulai menurun pada tahun 2013 yaitu pada posisi 34,64 persen hingga pada tahun 2015 kontribusi komponen ini pada posisi 43,10 persen atau yang terendah dalam periode lima tahun terakhir (2011-2015).

Komponen impor secara riil mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2011-2012 hingga di atas 12 persen meskipun demikian pertumbuhan komponen ini mengalami kontraksi pada tahun 2013 sebesar 17,47 persen. Penurunan kinerja impor berkaitan dengan pelemahan ekonomi global karena mayoritas impor Jawa Barat merupakan impor bahan baku yang dipakai untuk produksi, dimana produksi sendiri sangat tergantung terhadap permintaan ekspor. Hal ini dapat diamati dari perlambatan pertumbuhan permintaan ekspor pada tahun 2013 sebesar 6,29 persen.

Memasuki tahun 2014 komponen impor secara riil kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,06 persen, tetapi kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 6,02 persen. Meskipun demikian peningkatan kinerja pada periode tersebut komponen impor tidak serta merta mendorong proporsi komponen ini dalam perekonomian Jawa Barat. Momentum ini harus dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja ekonomi Jawa Barat mengingat komponen impor merupakan pengurang bagi pertumbuhan ekonomi.

<http://jabar.bps.go.id>

BAB IV

**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2011 - 2015**

<http://jabar.bps.go.id>

Agregat dari PDRB merupakan nilai gabungan yang mengukur aspek tertentu dari aktivitas dari keseluruhan ekonomi. Agregat tersebut merupakan besaran pokok dan indikator ringkas untuk tujuan analisis ekonomi makro, perbandingan antar waktu maupun antar wilayah.

Analisis perkembangan agregat PDRB digunakan dalam analisis sosial ekonomi suatu wilayah yang meliputi perbandingan atau rasio antar komponen seperti perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap nilai ekspor, PMTB dan PDRB total. Demikian juga perbandingan antar nilai ekspor terhadap PMTB, nilai PDRB terhadap impor, keseimbangan total penyediaan dengan total permintaan dan neraca perdagangan. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB Pengeluaran merupakan jumlah konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi dengan impor barang dan jasa. Dengan demikian nilai PDRB ini, dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik.

Dari series data PDRB Pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain seperti rumah tangga dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan satu wilayah dapat didekati dengan nilai dari data PDRB perkapita.

**Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	1,021,628.60	1,128,245.68	1,258,989.33	1,386,333.93	1,525,149.16
- ADHK 2010	965,622.06	1,028,409.74	1,093,543.55	1,149,231.43	1,207,001.49
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	23,251.17	25,272.29	27,767.25	30,118.27	32,651.73
- ADHK 2010	21,976.53	23,036.00	24,118.31	24,967.19	25,840.54
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4.78	4.82	4.70	3.52	3.50
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	43.227	43.939	44.644	45.341	46,710
Pertumbuhan	1.65	1.60	1.56	1.52	1.47

Seiring dengan peningkatan nilai total PDRB Provinsi Jawa Barat, maka PDRB per-kapita menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 17), meskipun dari sisi jumlah penduduk juga mengalami peningkatan. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Provinsi Jawa Barat secara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

PDRB per-kapita Provinsi Jawa Barat di tahun 2011 mencapai Rp. 23.251,17 ribu rupiah dan di tahun 2015 meningkat hingga mencapai Rp32.651,73 ribu rupiah. Peningkatan per-kapita pada kisaran 4 persen dari tahun 2011 sampai tahun 2013, adapun mulai tahun 2014 sampai 2015 melambat pada kisaran 3 persen. Adapun pertumbuhan jumlah penduduk mengalami perlambatan dari 1,65% di tahun 2011 menjadi 1,47% di tahun 2014. Dengan demikian maka pertumbuhan PDRB per-kapita tersebut mengalmi perlambatan baik secara “riil” maupun secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah pengeluaran yang terdiri dari konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga residen. Konsumsi ini meliputi konsumsi yang diperoleh dari pembelian juga perkiraan transaksi barter yaitu barang dan jasa yang diterima dari pihak lain dan barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri.

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Memberi gambaran dari produk yang dihasilkan di wilayah tersebut berapa besar untuk konsumsi dan berapa besar digunakan untuk ekspor.

Kontrobusi konsumsi rumah tangga PDRB Jawa Barat sangat dominan yaitu sekitar 65 persen, artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Jawa Barat sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun demikian, besaran yang di konsumsi rumah tangga didalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	671.158,67	734.272,45	812,568.32	881,109.40	983,714.23
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	386.122,92	431.031,27	440,292.66	528,968.39	618,551.82
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,74	1,70	1.85	1.67	1.59

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 konsumsi akhir rumah tangga mencapai Rp. 671,16 triliun

dan pada tahun 2015 meningkat hingga Rp. 983,71 triliun, demikian pula untuk total ekspor Jawa Barat di tahun 2011 masih Rp. 386,12 triliun dan di tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 618,55 triliun.

Selama kurun waktu 2011-2015 perbandingan antara konsumsi akhir rumah tangga dengan ekspor diperoleh bahwa rata-ratanya mencapai 1,71. Hal ini memberi gambaran bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga di wilayah Provinsi Jawa Barat hampir mencapai dua kali lipat dari produk yang digunakan untuk ekspor. Nilai perkembangan perbandingan antara konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor tiap tahun diperoleh bahwa di tahun 2013 nilainya paling tinggi dibanding tahun kedepannya. Menurunnya nilai perbandingan ini memberikan gambaran bahwa tingkat kenaikan konsumsi rumah tangga tidak sebesar kenaikan di ekspor, hal ini masih memberikan harapan bagi Provinsi Jawa Barat untuk bisa meningkatkan nilai ekpornya baik dalam negeri maupun luar negeri.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau rasio penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dan PMTB dimaksudkan untuk mengamati berapa besar penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dan PMTB (investasi). Nilai PMTB diukur dengan total nilai perolehan dikurangi pelepasan aset tetap milik produsen selama periode neraca, tambah pengeluaran atas jasa tertentu yang menambah nilai aset tak diproduksi..

Dari table 19 sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah Provinsi Jawa Barat digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga adapun untuk PMTB masih jauh tertinggal hanya 1/3 dari total konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	671.158,67	734.272,45	812,568.32	881,109.40	983,714.23
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	252.467,43	294.079,17	301,400.00	357,075.09	396,363.31
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,66	2,50	2.70	2.47	2.48

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun. Rata-rata rasio selama kurun waktu 2011-2015 sebesar 2,56 yang artinya hasil produk telah dihasilkan di provinsi Jawa Barat yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga mencapai 2 kali lipat lebih dibandingkan digunakan untuk investasi. Hal ini memberi gambaran bahwa tingkat investasi yang berasal dari produk wilayah sendiri masih jauh dibandingkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Perkembangan nilai rasio ini dari sebesar 2,66 pada tahun 2010 menjadi 2,48 pada tahun 2015. Semakin menurunnya rasio ini memberikan sinyal yang baik bahwa perkembangan nilai investasi melaju lebih baik dibandingkan dengan perkembangan konsumsi akhir rumah tangga.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut

mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Pelaku konsumsi akhir ini tidak termasuk pengeluaran untuk aset tetap dalam bentuk tempat tinggal atau barang berharga. Pengeluaran rumah tangga untuk tempat tinggal pembentukan modal tetap bruto.

Tabel 20. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	671.158,67	734.272,45	812.568,32	881.109,40	983.714,23
b. LNPRT	6.396,18	6.859,56	8.518,79	9.189,59	8.908,65
c. Pemerintah	59.786,93	68.994,16	73.717,54	81.202,69	98.292,76
Jumlah	737.341,77	810.126,17	894.804,66	971.501,68	1.090.915,64
PDRB (ADHB) (Milyar Rp)	1.021.628,60	1.128.245,68	1.258.989,33	1.386.333,93	1.525.149,16
Proporsi (%)	72,17	71,80	71,07	70,08	71,53

Tabel 20, menggambarkan proporsi total konsumsi akhir dari rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai rata-rata 71,66 persen yang sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga kemudian diikuti oleh konsumsi pemerintah dan terakhir konsumsi LNPRT. Perkembangan nilai konsumsi akhir dari tahun 2011 sampai dengan 2015 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun demikian proporsinya terhadap PDRB semakin menurun, terkecuali di tahun 2015 dimana proporsinya mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 proporsi konsumsi akhir mencapai 73,17 persen di tahun 2015 menurun hingga 71,53 persen. Hal ini memberi gambaran bahwa pembentukan PDRB selain oleh konsumsi, komponen lainnya yaitu komponen dari PMTB dan ekspor tumbuh dengan baik .

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Kegiatan ekspor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi baik atas dasar penjualan/pembelian, barter, hadiah atau hibah atas barang dan jasa antar residen dengan non residen yang berada diluar wilayah tersebut baik dalam negeri maupun luar negeri. Perbandingan ekspor terhadap PMTB memberi gambaran bahwa hasil dari produk wilayah seberapa besar digunakan ekspor dan digunakan untuk PMTB.

Jika rasio ekspor lebih tinggi dari PMTB memberi gambaran bahwa produk yang dihasilkan banyak digunakan untuk kegiatan ekspor dibandingkan digunakan untuk investasi demikian sebaliknya jika rasionya lebih kecil dari 1 maka memberi gambaran bahwa hasil produk wilayah banyak digunakan untuk investasi daripada untuk ekspor.

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	386.122,92	431.031,27	440,292.66	528,968.39	618,551.82
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	252.467,43	294.079,17	301,400.00	357,075.09	396,363.31
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,53	1,47	1.46	1.48	1.56

Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Rasio ekspor terhadap PMTB dari tahun 2011-2015 mempunyai nilai rata-rata 1,50 (Tabel 21) yang artinya produk yang digunakan untuk ekspor lebih besar daripada digunakan untuk PMTB. Dari tahun ke tahun rasio ini hampir stabil hanya di tahun 2015 nilai rasionya mencapai 1,57 dan ini

merupakan angka tertinggi selama lima tahun. Disamping itu hal ini memberi gambaran bahwa kegiatan ekspor Jawa Barat semakin membaik.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1.021.628,60	1.128.245,68	1,258,989.33	1,386,333.93	1,525,149.16
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	396.250,60	480.007,31	436,057.69	548,947.06	657,297.80
Rasio PDRB terhadap Impor	2,58	2,35	2.89	2.53	2.32

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2011-2015 menunjukkan trend yang semakin menurun dengan kecuali di tahun 2013 yang justru meningkat. Hal ini memberi gambaran tingkat ketergantungan terhadap produk impor semakin meningkat kecuali di tahun 2013 yang disebabkan oleh nilai impor berkurang disamping peningkatan nilai PDRB-nya. Pada tahun 2011 rasionya mencapai 2,58, 2012 turun menjadi 2,35 tahun 2013 meningkat menjadi 2,89 dan tahun 2014 kembali menurun 2,53 dan di tahun kemudian turun lagi 2,32.

Penurunan rasio ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor dimana jika rasio menurun menunjukkan ketergantungan impor semakin tinggi sebaliknya jika rasio meningkat maka

ketergantungan terhadap impor menurun. Dari tahun 2011-2015 terlihat bahwa pada tahun 2015 merupakan tahun ketergantungan impor paling tinggi disamping tahun 2012 dan di tahun 2013 ketergantungan impor berkurang cukup besar.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Total penyediaan adalah jumlah produk yang digunakan dalam ekonomi yang berasal dari produksi domestik atau impor sehingga total penyediaan ini merupakan penjumlahan dari output dengan impor. Adapun keseimbangan antara total penyediaan dengan permintaan adalah keseimbangan antara total output dan Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan PDRB (ADHB) (Miliar Rp) %	1.417.879,20 78,16	1.608.252,99 77,01	1.258.989,33 74,27	1.386.333,93 71,63	1.525.149,16 69,88
Total nilai Impor ADHB (Miliar Rp) %	396.250,60 21,84	480.007,31 22,99	436.057,69 25,73	548.947,06 28,37	657.297,80 30,12
Total Permintaan Akhir ⁸ (Miliar Rp) %	1.814.129,80 100,00	2.088.260,30 100,00	1.695.047,01 100,00	1.935.280,99 100,00	2.182.446,96 100,00

⁸ Termasuk diskrepansi statistik

Dari tabel tersebut diatas, dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan akhir masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari Rp. 1.814.129,80 miliar (2011) menjadi sebesar Rp. 2.182.446,96 miliar (2015). Untuk memenuhi jumlah permintaan sebagian produk masih harus didatangkan dari luar dengan rasio impor tertinggi di tahun 2015 sebesar 30,12 persen dan terendah di tahun 2011 sebesar 21,84 persen. Adapun pemenuhan kebutuhan yang berasal dari produk domestik ada kecenderungan akan terus menurun seiring dengan meningkatnya rasio total impor terkecuali di tahun 2015 dimana rasio impor mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Provinsi Jawa Barat baru bisa memenuhi sekitar 71 persen dari selisih hasil produksi domestik. Untuk itu sangat diperlukan inovasi-inovasi baru sehingga akan meningkatkan pemenuhan permintaan akhir yang berasal dari produk domestik.

Di sisi lain secara rinci tiap tahun “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik Jawa Barat dari tahun 2011-2015 dan nilai impor dapat diamati pada Tabel 23 .

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	386.122,92	431.031,27	440,292.66	528,968.39	618,551.82
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	396.250,60	480.007,31	436,057.69	548,947.06	657,297.80
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	(10.127,68)	(48.976,04)	4,234.97	(19,978.67)	(38,745.98)
Rasio ekspor thdp Impor	0,97	0,90	1.01	0.96	0.94

Selama periode 2011-2015, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Jawa Barat dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif kecuali tahun 2013 menunjukkan angka positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Jawa Barat dalam posisi defisit hanya di tahun 2013 menunjukkan surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa yang keluar, yang dalam konteks lain disebut sebagai "**utang luar negeri**". Defisit perdagangan Provinsi Jawa Barat yang terjadi antara tahun 2010 sampai dengan 2014 tercatat masing-masing sebesar Rp. 10.127,697 miliar (2011), Rp. 48.976,04 miliar (2012) dan Rp. 19.978,67 miliar (2014) dan Rp. 38.745,98 miliar (2015). Hanya di tahun 2013 saja posisi perdagangan barang dan jasa mengalami surplus dimana nilai ekspor lebih besar daripada impor yaitu Rp. 4.234,97 miliar.

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2011-2012 dan tahun 2014-2015 dengan rata-rata rasio ekspor terhadap impor sebesar 0.94.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d +1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 25. Rasio Perdagangan Internasional, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	244.867,28	261.968,65	279.660.31	329,350.77	347,436.80
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	160.660,65	162.875,84	165,900.80	185,811.81	182,558.36
(X - M) (Miliar Rp)	84.206,63	99.092,81	113,759.50	143,538.96	164,878.45
(X +M) (Miliar Rp)	405.527,93	424.844,49	445,561.11	515,162.59	529,995.16
RPI	0,21	0,23	0,26	0,28	0,31

Tabel 25. menggambarkan perkembangan ekspor dan impor luar negeri, terlihat bahwa pada periode tahun 2011-2015 posisi ekspor luar negeri selalu lebih tinggi dari pada impor luar negeri dengan kecenderungan terus meningkat. Nilai ekspor luar negeri dari Rp.244.867,28 Milyar menjadi Rp. 347.436,80 Milayar di tahun 2015. Hal yang sama dengan impor luar negeri

menunjukkan kecenderungan terus meningkat namun masih di bawah nilai ekspor. Rasio Perdagangan Internasional (RPI) Provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2014 mengindikasikan bahwa perdagangan internasionalnya selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, meskipun dengan rasio masih cukup kecil yaitu kurang dari 0,26 dengan RPI tertinggi di tahun 2015 sebesar 0.31.

<http://jabar.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

<http://jabar.bps.go.id>

1. PDRB menurut penggunaan tahun 2011 s.d 2015 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Jawa Barat pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2011 s.d 2015, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan

indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Jawa Barat terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

LAMPIRAN

<http://jabar.bps.go.id>

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	671.158.667	734.272.453	812.568.324	881.109.399	983.714.227
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	238.223.535	269.273.857	305.836.322	343.286.038	387.560.659
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	28.563.871	31.912.804	35.022.297	36.211.694	41.199.949
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggara	84.176.498	89.013.786	99.472.712	104.461.806	119.142.681
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	41.982.041	44.443.465	48.945.531	52.461.770	56.828.471
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	191.751.485	204.601.392	222.219.757	236.309.593	263.588.897
1.f. Hotel dan Restoran	47.346.363	51.058.095	54.290.767	57.176.596	59.263.544
1.g. Lainnya	39.114.873	43.969.055	46.780.937	51.201.901	56.130.026
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.396.177	6.859.562	8.518.791	9.189.586	8.908.646
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	59.786.927	68.994.158	73.717.545	81.202.692	98.292.765
3.a. Konsumsi Kolektif	33.026.755	37.638.704	41.628.105	46.353.994	55.235.871
3.b. Konsumsi Individu	26.760.172	31.355.454	32.089.440	34.848.698	43.056.894
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	252.467.435	294.079.170	301.400.004	357.075.089	396.363.315
4.a. Bangunan	172.293.013	201.886.557	233.363.313	261.507.964	288.694.439
4.b. Non-Bangunan	80.174.422	92.192.613	68.036.691	95.567.126	107.686.250
5. Perubahan Inventori	41.947.076	73.016.379	58.549.693	77.750.129	76.616.191
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	244.867.284	261.968.649	279.660.307	329.350.772	347.436.804
6.a. Barang	241.298.462	257.591.978	274.569.654	323.592.776	342.098.336
6.b. Jasa	3.568.822	4.376.672	5.090.653	5.757.996	5.338.468
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	160.660.650	162.875.842	165.900.804	185.811.813	182.558.357
7.a. Barang	147.952.461	148.850.912	148.849.890	164.006.475	158.858.599
7.b. Jasa	12.708.189	14.024.930	17.050.914	21.805.338	23.699.758
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(94.334.318)	(148.068.846)	(109.524.532)	(163.531.924)	(203.624.429)
8.a. Ekspor	141.255.633	169.062.622	160.632.350	199.617.618	271.115.014
8.b. Impor	235.589.951	317.131.467	270.156.882	363.149.543	474.739.443
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1.021.628.597	1.128.245.685	1.258.989.329	1.386.333.929	1.525.149.163

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	636.965.211	666.398.077	695.522.782	723.018.268	759.652.857
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	219.397.199	228.899.146	238.789.659	251.873.389	269.066.091
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	27.948.672	30.616.286	33.051.233	33.923.862	36.497.936
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggara	81.358.188	84.016.985	87.185.409	88.786.750	93.813.227
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	41.022.872	42.219.836	45.270.808	47.522.578	48.947.612
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	182.819.318	191.100.047	198.928.774	205.449.428	213.946.187
1.f. Hotel dan Restoran	46.592.064	49.418.072	51.082.000	50.947.886	52.051.847
1.g. Lainnya	37.826.898	40.127.705	41.214.900	44.514.374	45.329.956
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.262.355	6.529.562	7.466.064	7.726.701	7.098.776
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	54.949.787	58.348.054	58.868.332	61.314.913	65.952.761
3.a. Konsumsi Kolektif	30.042.268	31.934.783	33.350.456	34.613.136	36.796.112
3.b. Konsumsi Individu	24.907.520	26.413.270	25.517.876	26.701.777	29.156.649
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	245.323.571	271.070.796	268.318.281	295.593.423	308.880.922
4.a. Bangunan	166.521.297	186.619.324	206.790.122	215.055.740	225.128.732
4.b. Non-Bangunan	78.802.274	84.451.472	61.528.159	80.537.683	83.752.189
5. Perubahan Inventori	40.334.494	67.695.891	52.493.816	61.648.994	55.216.705
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	239.424.315	254.271.203	245.716.075	259.455.951	258.879.345
6.a. Barang	235.945.750	250.246.392	241.498.715	255.183.573	255.213.281
6.b. Jasa	3.478.564	4.024.811	4.217.360	4.272.378	3.666.064
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	152.080.767	142.905.277	139.505.920	148.509.184	140.786.909
7.a. Barang	139.334.658	130.018.061	125.928.421	133.189.561	125.449.839
7.b. Jasa	12.746.109	12.887.216	13.577.499	15.319.622	15.337.070
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(105.556.905)	(152.998.566)	(95.335.885)	(111.017.634)	(107.892.970)
8.a. Ekspor	131.010.552	150.354.051	133.438.150	149.471.971	184.921.790
8.b. Impor	236.567.457	303.352.617	228.774.035	260.489.606	292.814.760
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	965.622.061	1.028.409.740	1.093.543.546	1.149.231.432	1.207.001.487

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	65,69	65,08	64,54	63,56	64,50
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	23,32	23,87	24,29	24,76	25,41
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,80	2,83	2,78	2,61	2,70
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggara	8,24	7,89	7,90	7,54	7,81
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,11	3,94	3,89	3,78	3,73
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18,77	18,13	17,65	17,05	17,28
1.f. Hotel dan Restoran	4,63	4,53	4,31	4,12	3,89
1.g. Lainnya	3,83	3,90	3,72	3,69	3,68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,63	0,61	0,68	0,66	0,58
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	5,85	6,12	5,86	5,86	6,44
3.a. Konsumsi Kolektif	3,23	3,34	3,31	3,34	3,62
3.b. Konsumsi Individu	2,62	2,78	2,55	2,51	2,82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	24,71	26,07	23,94	25,76	25,99
4.a. Bangunan	16,86	17,89	18,54	18,86	18,93
4.b. Non-Bangunan	7,85	8,17	5,40	6,89	7,06
5. Perubahan Inventori	4,11	6,47	4,65	5,61	5,02
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	23,97	23,22	22,21	23,76	22,78
6.a. Barang	23,62	22,83	21,81	23,34	22,43
6.b. Jasa	0,35	0,39	0,40	0,42	0,35
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	15,73	14,44	13,18	13,40	11,97
7.a. Barang	14,48	13,19	11,82	11,83	10,42
7.b. Jasa	1,24	1,24	1,35	1,57	1,55
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(9,23)	(13,12)	(8,70)	(11,80)	(13,35)
8.a. Ekspor	13,83	14,98	12,76	14,40	17,78
8.b. Impor	23,06	28,11	21,46	26,19	31,13
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	65,96	64,80	63,60	62,91	62,94
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	22,72	22,26	21,84	21,92	22,29
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,89	2,98	3,02	2,95	3,02
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggara	8,43	8,17	7,97	7,73	7,77
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,25	4,11	4,14	4,14	4,06
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18,93	18,58	18,19	17,88	17,73
1.f. Hotel dan Restoran	4,83	4,81	4,67	4,43	4,31
1.g. Lainnya	3,92	3,90	3,77	3,87	3,76
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,65	0,63	0,68	0,67	0,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	5,69	5,67	5,38	5,34	5,46
3.a. Konsumsi Kolektif	3,11	3,11	3,05	3,01	3,05
3.b. Konsumsi Individu	2,58	2,57	2,33	2,32	2,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	25,41	26,36	24,54	25,72	25,59
4.a. Bangunan	17,24	18,15	18,91	18,71	18,65
4.b. Non-Bangunan	8,16	8,21	5,63	7,01	6,94
5. Perubahan Inventori	4,18	6,58	4,80	5,36	4,57
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	24,79	24,72	22,47	22,58	21,45
6.a. Barang	24,43	24,33	22,08	22,20	21,14
6.b. Jasa	0,36	0,39	0,39	0,37	0,30
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	15,75	13,90	12,76	12,92	11,66
7.a. Barang	14,43	12,64	11,52	11,59	10,39
7.b. Jasa	1,32	1,25	1,24	1,33	1,27
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(10,93)	(14,88)	(8,72)	(9,66)	(8,94)
8.a. Ekspor	13,57	14,62	12,20	13,01	15,32
8.b. Impor	24,50	29,50	20,92	22,67	24,26
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	10,09	9,40	10,66	8,44	11,64
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	13,04	13,03	13,58	12,25	12,90
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,91	11,72	9,74	3,40	13,78
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggara	5,38	5,75	11,75	5,02	14,05
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,68	5,86	10,13	7,18	8,32
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,12	6,70	8,61	6,34	11,54
1.f. Hotel dan Restoran	6,64	7,84	6,33	5,32	3,65
1.g. Lainnya	14,49	12,41	6,40	9,45	9,62
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,80	7,24	24,19	7,87	(3,06)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	8,86	15,40	6,85	10,15	21,05
3.a. Konsumsi Kolektif	9,63	13,96	10,60	11,35	19,16
3.b. Konsumsi Individu	7,92	17,17	2,34	8,60	23,55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	13,97	16,48	2,49	18,47	11,00
4.a. Bangunan	13,62	17,18	15,59	12,06	10,40
4.b. Non-Bangunan	14,73	14,99	(26,20)	40,46	12,68
5. Perubahan Inventori	(5,32)	74,07	(19,81)	32,79	(1,46)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	8,07	6,98	6,75	17,77	5,49
6.a. Barang	7,87	6,75	6,59	17,85	5,72
6.b. Jasa	23,31	22,64	16,31	13,11	(7,29)
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	17,56	1,38	1,86	12,00	(1,75)
7.a. Barang	19,24	0,61	(0,00)	10,18	(3,14)
7.b. Jasa	1,04	10,36	21,58	27,88	8,69
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(21,16)	56,96	(26,03)	49,31	24,52
8.a. Ekspor	57,42	19,69	(4,99)	24,27	35,82
8.b. Impor	12,51	34,61	(14,81)	34,42	30,73
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	12,68	10,44	11,59	10,11	10,01

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,48	4,62	4,37	3,95	5,07
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,11	4,33	4,32	5,48	6,83
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,63	9,54	7,95	2,64	7,59
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggara	1,86	3,27	3,77	1,84	5,66
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,24	2,92	7,23	4,97	3,00
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,99	4,53	4,10	3,28	4,14
1.f. Hotel dan Restoran	4,94	6,07	3,37	(0,26)	2,17
1.g. Lainnya	10,72	6,08	2,71	8,01	1,83
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,59	4,27	14,34	3,49	(8,13)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	0,05	6,18	0,89	4,16	7,56
3.a. Konsumsi Kolektif	(0,28)	6,30	4,43	3,79	6,31
3.b. Konsumsi Individu	0,45	6,05	(3,39)	4,64	9,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	10,74	10,50	(1,02)	10,17	4,50
4.a. Bangunan	9,81	12,07	10,81	4,00	4,68
4.b. Non-Bangunan	12,77	7,17	(27,14)	30,90	3,99
5. Perubahan Inventori	(8,96)	67,84	(22,46)	17,44	(10,43)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	5,67	6,20	(3,36)	5,59	(0,22)
6.a. Barang	5,48	6,06	(3,50)	5,67	0,01
6.b. Jasa	20,19	15,70	4,78	1,30	(14,19)
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	11,29	(6,03)	(2,38)	6,45	(5,20)
7.a. Barang	12,29	(6,69)	(3,15)	5,77	(5,81)
7.b. Jasa	1,34	1,11	5,36	12,83	0,11
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(11,79)	44,94	(37,69)	16,45	(2,81)
8.a. Ekspor	46,00	14,76	(11,25)	12,02	23,72
8.b. Impor	12,98	28,23	(24,58)	13,86	12,41
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	6,50	6,50	6,33	5,09	5,03

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	110	109	111	108	112
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	113	113	114	112	113
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	106	112	110	103	114
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggara	105	106	112	105	114
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	107	106	110	107	108
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	110	107	109	106	112
1.f. Hotel dan Restoran	107	108	106	105	104
1.g. Lainnya	114	112	106	109	110
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	106	107	124	108	97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	109	115	107	110	121
3.a. Konsumsi Kolektif	110	114	111	111	119
3.b. Konsumsi Individu	108	117	102	109	124
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	114	116	102	118	111
4.a. Bangunan	114	117	116	112	110
4.b. Non-Bangunan	115	115	74	140	113
5. Perubahan Inventori	95	174	80	133	99
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	108	107	107	118	105
6.a. Barang	108	107	107	118	106
6.b. Jasa	123	123	116	113	93
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	118	101	102	112	98
7.a. Barang	119	101	100	110	97
7.b. Jasa	101	110	122	128	109
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	79	157	74	149	125
8.a. Ekspor	157	120	95	124	136
8.b. Impor	113	135	85	134	131
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	113	110	112	110	110

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat**

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	104	105	104	104	105
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	104	104	104	105	107
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	104	110	108	103	108
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggara	102	103	104	102	106
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	104	103	107	105	103
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	105	105	104	103	104
1.f. Hotel dan Restoran	105	106	103	100	102
1.g. Lainnya	111	106	103	108	102
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	104	104	114	103	92
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100	106	101	104	108
3.a. Konsumsi Kolektif	100	106	104	104	106
3.b. Konsumsi Individu	100	106	97	105	109
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	111	110	99	110	104
4.a. Bangunan	110	112	111	104	105
4.b. Non-Bangunan	113	107	73	131	104
5. Perubahan Inventori	91	168	78	117	90
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	106	106	97	106	100
6.a. Barang	105	106	97	106	100
6.b. Jasa	120	116	105	101	86
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	111	94	98	106	95
7.a. Barang	112	93	97	106	94
7.b. Jasa	101	101	105	113	100
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	88	145	62	116	97
8.a. Ekspor	146	115	89	112	124
8.b. Impor	113	128	75	114	112
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	107	107	106	105	105

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	105	110	117	122	129
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	109	118	128	136	144
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	102	104	106	107	113
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggara	103	106	114	118	127
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	102	105	108	110	116
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	105	107	112	115	123
1.f. Hotel dan Restoran	102	103	106	112	114
1.g. Lainnya	103	110	114	115	124
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	102	105	114	119	125
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	109	118	125	132	149
3.a. Konsumsi Kolektif	110	118	125	134	150
3.b. Konsumsi Individu	107	119	126	131	148
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	103	108	112	121	128
4.a. Bangunan	103	108	113	122	128
4.b. Non-Bangunan	102	109	111	119	129
5. Perubahan Inventori	104	108	112	126	139
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	102	103	114	127	134
6.a. Barang	102	103	114	127	134
6.b. Jasa	103	109	121	135	146
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	106	114	119	125	130
7.a. Barang	106	114	118	123	127
7.b. Jasa	100	109	126	142	155
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	89	97	115	147	189
8.a. Ekspor	108	112	120	134	147
8.b. Impor	100	105	118	139	162
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	106	110	115	121	126

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran , Provinsi Jawa Barat**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,37	4,57	6,03	4,31	6,26
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,58	8,34	8,87	6,41	5,68
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,20	1,99	1,66	0,74	5,75
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggara	3,46	2,40	7,69	3,12	7,94
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,34	2,86	2,71	2,11	5,17
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,89	2,08	4,34	2,97	7,11
1.f. Hotel dan Restoran	1,62	1,67	2,87	5,59	1,45
1.g. Lainnya	3,40	5,96	3,59	1,34	7,65
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,14	2,86	8,61	4,24	5,52
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	8,80	8,68	5,90	5,76	12,53
3.a. Konsumsi Kolektif	9,93	7,21	5,90	7,29	12,09
3.b. Konsumsi Individu	7,44	10,49	5,93	3,78	13,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	2,91	5,42	3,54	7,54	6,23
4.a. Bangunan	3,47	4,56	4,32	7,75	5,46
4.b. Non-Bangunan	1,74	7,30	1,29	7,31	8,36
5. Perubahan Inventori	4,00	3,71	3,41	13,07	10,02
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	2,27	0,74	10,47	11,53	5,73
6.a. Barang	2,27	0,65	10,45	11,53	5,71
6.b. Jasa	2,59	5,99	11,00	11,65	8,05
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	5,64	7,89	4,34	5,21	3,64
7.a. Barang	6,18	7,82	3,25	4,18	2,84
7.b. Jasa	(0,30)	9,15	15,39	13,34	8,56
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(10,63)	8,29	18,71	28,22	28,12
8.a. Ekspor	7,82	4,29	7,06	10,94	9,78
8.b. Impor	(0,41)	4,98	12,96	18,06	16,30
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	5,80	3,69	4,94	4,78	4,75

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat
Telp.: 022 7272595; 022 7201696; Faks.: 022 7213572
E-Mail: bps3200@bps.go.id
Website: <http://jabar.bps.go.id>